Yang tersisa dari “kemustahilan”¹

Irfan Palippui (Alumni IRB Universitas Sanata Dharma)

Kata-kata yang muncul dibenak saya ketika diminta menjadi penanggap di forum Ascoltaci ini adalah kemungkinan dan ketakungkinan. Mungkinkah saya memadai membicarakan ikhwal atau peristiwa yang telah mendahului kedirian saya sendiri; mungkinkah saya membicarakan Jogja dan Papua sebagai sesuatu, dari jarak entitas yang muskil tersentuh sepenuhnya oleh pengalaman ketubuhan sendiri. Saya tiba-tiba terpaku dan menatap dalam-dalam diri saya. Siapa dan apa mau saya? Bukankah forum ini adalah kemustahilan yang di dalamnya sengaja disisakan suatu kemungkinan untuk dibayangkan dan dibicarakan lebih jauh. Saya tiba-tiba merasa di tengah-tengah suatu peristiwa di mana saya menjadi kemustahilan itu sendiri. Di titik ini, mau tidak mau saya mengambil posisi keduanya, sekaligus “menolak” keduanya, lalu melesat ke dalam “kemustahilan” dan mencoba masuk pada kemungkinan lainnya.

Tulisan ini akan meminjam gagasan Lacan dan Zizek melihat bagaimana Papua dan Jogja berinteraksi dalam tatanan bahasa yang disebut Yogyakarta itu. Konsekuensi dari tulisan ini sangat bergantung pada data-data yang bersumber dari observasi dan wawancara singkat penulis berada di sekitaran wacana Papua dan Jogja; Skripsi Sawilda yang melampirkan data tentang ancaman dan alasan orang merasa terancam; dan tulisan artikel, berita, dan percakapan dari internet (baik di FB dan Portal News) tentang Papua dan Jogja. Data-data inilah yang diolah lewat program Nvivo. Semua data tentang Papua dan Jogja dikelompokkan lalu dikoding menjadi *nodes* dan diperkecil lagi ke dalam *cases*. Pengelompokan lewat *Nodes* dan *cases* secara otomatis melahirkan bagan dan hubungan-hubungan satu sama lain, termasuk sumber rujukannya.

Menjadi subjek dari “kemustahilan” yang otentik

Selama sehari-hari saya tidak melakukan apa-apa untuk forum Ascoltaci ini. Saya membiarkan kekosongan terus menjelma dan membiarkan segala tatanan bahasa mengenai Jogja dan Papua tidak menguasai aktivitas keseharian di rumah. Saya tetap mengurus anak-anak kala istri berangkat kuliah dan memberi sibayi stok susu dari dot yang dititipkan ibunya. Keseharian itu saya biarkan larut bersama sibocah kecil yang masih menjelang tiga bulan. Menemaninya dengan segala upaya bahasa agar bisa menenangkannya, meski saya tahu ia hanya bisa tenang dengan susu ibunya. Begitulah

¹ Makalah ini dipresentasikan pada Seminar Ascoltaci #14 yang dilaksanakan oleh Magister Ilmu Religi dan Budaya USD dan Fakultas Psikologi USD. Yogyakarta, 22 November 2018

anak kedua saya, bahasanya hanya berada di antara tangisan (kala lapar), tidur dalam dekapan, tertawa, bermain (menatap, menggerakkan tangan dan kakinya, dst) seolah merespon segala ‘yang lain’ di hadapannya.

Berbeda dengan anak pertama saya. Usianya menjelang tiga tahun. Kini telah bisa bermain dengan bonekanya sendiri. Ia juga terkadang sesekali menatap dalam-dalam dirinya dalam cermin, dan memperagakan cara-cara tertentu lewat mainannya. Misalnya, ia bermain layaknya juru masak bersama benda-benda miliknya, memperagakan cara ibunya memasak di dapur. Lain waktu ia juga menyasar ke dapur mencoba menyalakan kompor gas, menaruh panci di atasnya atau mengambil barang-barang di rak piring dan menyelupkannya ke dalam air.

Anak pertamaku perempuan, mungkin karena merasakan banyak kesamaan dari benda (mainan) miliknya dan milik ibunya, sehingga ia banyak mengidentifikasi diri berdasarkan aktivitas ibunya di rumah. Selain itu, ia juga sudah bisa menyanyi, meniru pelafalan lirik lagu anak-anak yang saya download buatnya dari Youtube; dan senang hati mengulang dan melafalkan nyanyian untuk menunjukkannya kepada saya ataupun ibunya. Ia telah menyimpan banyak kosakata dan mampu menghubungkannya dengan realitas benda-benda di sekitarnya. Ia juga telah mengenali Om Kumis, tetangga kami, yang dianggapnya dapat menciptakan rasa takut – sebab sering mendengar dari “yang lain” (ibunya), *kumpulkan mainannya, itu.. ada Om Kumis!* Baginya aksen itu agak berbeda ketika ibunya bilang, *Itu, Ayah sudah datang!* Mungkin Om Kumis tidak pernah memberinya coklat (nikmat lebih) sebagaimana Ayah menyimbolisasinya dalam bentuk rasa sayang padanya. Atau karena bahasa ibunya yang mengakibatkan trauma, takut kehilangan mainan dan kasih sayang itu sendiri.

Kedua narasi tentang anak saya di atas, rupanya menjadi jalan masuk membicarakan Jogja dan Papua. Lewat subjektivitas Lacanian, secara tak langsung saya telah menjelaskan fase pembentukan subjek. Lacan menaruh perhatian besar pada yang disebutnya fase cermin. Fase cermin ini dibagi lagi menjadi dua fase pengenalan, yaitu: Pra-cermin dan fase cermin. Pra cermin merupakan fase paling primordial sang anak, sehingga yang dialaminya adalah kepenuhan atau keutuhan bersama ibunya. Ia belum bisa membedakan antara dirinya dan ibunya. Untuk kasus anaku yang kedua, ia masih di fase awal ini, di mana segala kebutuhan masih sangat penuh, utuh.

Selanjutnya, fase cermin sebagai pengenalan dan identifikasi diri lewat “yang lain” adalah jalan pembentukan ego sang anak. Ia telah dapat mengenali “yang lain” di hadapannya. Pengenalan ini membuat segalanya berubah. Pertama, sang anak menemukan ibunya sebagai yang tidak utuh, *lackness* dan ingin menjadi pengisi *lack* ibunya.² Kedua, keinginan mengisi kemustahilan, *lackness* sang ibu terbantahkan dengan kehadiran sosok lain, sang ayah. Rupanya bukan aku yang diingini oleh ibuku,

² Irfan Palippui. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/Retorik/article/view/1517/1202>, hlm. 324

kata sang anak. Di fase ini digambarkan oleh Lacan sebagai tahap odipus-kompleks, ketika sang ayah datang membawah “pedang” kastrasi. Karena takut kastrasi, sang anak pun mencari jalan kenikmatan lain. Ia telah memalingkan wajahnya dari sang ibu, dan beralih kepada hukum sang ayah, berharap darinya bisa mendapatkan kepuhan dulu itu. Jadi seperti menerima hukum sang ayah untuk mendapatkan kembali yang hilang. Di sinilah ia memasuki tatanan simbolik/ bahasa. Hanya dengan mematuhi hukum sang ayah atau berbahasa, kenikmatan bersama ibuku hendak aku raih kembali.

Dalam tatanan pembentukan subjek Lacan, gambaran di atas menandai pergeseran dari Yang Real ke Yang Imaginer, dan Simbolik. Tatanan Real ditandai dengan kepuhan utuh atau kemustahilan yang tidak dapat diraih kembali. Tatanan Imaginer adalah fase identifikasi ego berhadapan dengan keretakannya sendiri kemudian mendesaknya menuju tatanan simbolik atau subjek berbahasa. Yang simbolik (Yang Lain Besar)³ dan Yang imajiner (*yang lain imajiner*)⁴ selalu beroperasi bersamaan ketika subjek mengoperasikan penandaan di tatanan simbolik, dan selalu berharap menembus Yang Real. Disebut subjek berbahasa, pertama: karena hanya dengan berbahasa, sang anak bisa mewakili segala keinginannya (permintaan). Kedua, dengan berbahasa berarti ia mematuhi hukum sang ayah. Hukum Sang Ayah/ Yang Lain Besar ini bisa siapa atau apa saja, termasuk ayah sendiri, agama, Negara, komunitas, dst. Ia adalah sebuah mekanisme (hukum/tatanan) yang dipakai setiap subjek dalam berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat (tatanan simbolik). Menjadi subjek adalah menerima kemustahilan, kekosongan, *lackness*. Itulah otentisitas menjadi subjek yang hanya bisa di atasi di tatanan simbolik dengan membiarkan diri tertawan di sana selamanya – bersama Yang Lain. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana tatanan itu bekerja dalam konteks Papua dan Jogja, kita akan lihat pada bagian pembahasan nanti.

Tentang Papua dan Jogja

Waktulah membuat saya mesti masuk ke dalam tatanan bahasa Jogja dan Papua. Pelaksana Ascoltaci telah mendesak saya agar segera memasukkan tulisan sebab akan digandakan dan sebagainya. Saya masih berkutat dalam kekosongan bahasa di atas dan baru memiliki dua pengalaman tentang anak-anak saya. Akan tetapi, saya sudah sedemikian percaya dengan kemustahilan meski tak meyakini wangsit dengan sendirinya menuliskan perjumpaan Jogja dan Papua (dengan segala problematikanya) di layar *Microsoft Word*. Akhirnya, saya menyiapkan waktu sehabian, mencari dan

³ Yang Lain Besar selalu merujuk pada hukum penandaan di tatanan simbolik, baik individu, polisi, guru, dll.

⁴ semua penandaan yang dipakai untuk menggantikan kehilangan itu.

mengumpulkan data-data; mulai dari pengalaman orang-orang di lingkungan saya tinggal; satpam, mahasiswa, dosen, dst. Semuanya bercerita dan tentu saja resepsinya berbeda-beda pula.

Misalnya, Supriyadi⁵ (satpam kosan) berkata begini, “Selama menjadi *security* kosan, ada banyak mahasiswa dari Papua saya temui. Mereka ramah-ramah, sering datang di pos menemani saya ngobrol. Beberapa dari mereka orang tuanya sering datang menjenguk anaknya, dan ada yang biasa membelikan saya rokok. Tapi ada yang susah dapat kosan loh pak? Celetukku. Sambil menarik nafas, Supriyadi melanjutkan, “Itu begini mas, ada kecenderungan kalau mahasiswa ini ngumpul sama teman-temannya dan mengobrol, suaranya agak keras sehingga ada yang merasa terganggu; dan ketika berkumpul di kosan, ada yang “minum-minum”, dan saat mabuk mereka ribut.” Tambahnya.

Di waktu lain, seorang dosen⁶ di salah satu PTN di Yogyakarta bercerita, “ Saya pernah mencari kos buat ponakan. Pemilik kos bertanya, orang mana, Mas? Saya bilang, Kupang. Raut wajah pemilik kos itu berubah. Ada sesuatu yang disembunyikan dan saya segera menimpali kalau ponakan saya orang Bugis, hanya saja ayah ibunya bekerja di Kupang. Ohh...! jawab ibu itu sambil tersenyum.”

Lebih lanjut, seorang mahasiswa⁷ dari PTS X membeberkan pengalamannya saat tinggal di sebuah kompleks yang bersebelahan dengan salah satu kontrakan yang dihuni oleh mahasiswa asal Papua. “Suatu waktu mahasiswa Papua sedang bikin acara di kontrakannya. Hingga menjelang tengah malam acara itu masih terus berlanjut. Mereka bernyanyi diiringi alat musik yang dimilikinya. Karena ada laporan warga sekitar, (merasa resah karena butuh istirahat), *security* kompleks datang mengingatkan. Akan tetapi, bukannya berhenti, malah cekcok fisik dengan *security*. Rupanya mereka sudah mabuk, kata mahasiswa dari PTS X itu.

Di atas adalah informasi awal yang sempat saya himpun. Karena tidak ingin mengambil langkah gegabah, pengalaman-pengalaman di atas saya jadikan titik berangkat saja. Sebab saya yakin dari ribuan mahasiswa Papua di Jogja tentu memiliki lebih banyak lagi kisah lainnya, baik kisah sunyi perjuangan menapaki jenjang studi maupun cerita perih melankolis karena ditinggal kekasih. Yakin saja.

Untuk mengumpulkan informasi lebih banyak lagi, saya memutuskan mengumpulkan sebanyak mungkin data dari internet dengan menggunakan kata kunci Jogja (Yogyakarta) dan Papua. Dari mesin pencarian google, dari sepersekian detik, saya menemukan ratusan ribu informasi dari terma di atas. Apa yang harus saya lakukan dengan data sebanyak itu? Sementara Mbak Desy sudah meneror saya untuk

⁵ Supriyadi (nama samara) *Security* di salah satu kosan di Sleman. Wawancara, 15 November 2018

⁶ namanya tidak ingin disebutkan, tinggal di Bantul. Wawancara 9 November 2018.

⁷ Nama dirahasiakan. Wawancara 10 November di Yogyakarta.

mengumpulkan tulisan. Bulan ini IRB sangat sibuk-padat, Mas. Katanya.he..he. Saya meminjam energi kata-kata, Mbak Desy, lalu seolah menciptakan kesibukan dahsyat dan meneruskan pengolahan data-data itu. Data yang terkumpul: baik dari interview singkat dari beberapa orang, data wawancara pada lampiran skripsi Sawilda, dan data dari mesin pencarian di internet tentang Jogja dan Papua, saya masukkan dalam program Nvivo. Data yang paling banyak muncul saya *coding* ke dalam *nodes* kemudian mengklasifikasikannya hingga makin mengecil.

Figure 1 Treemap dari items coded

Alhasil, muncullah klasifikasi (dari paling besar ke paling kecil) di antaranya: Mahasiswa Papua, Masyarakat Jogja, Indonesia, Pemerintah, Budaya, Yogyakarta, Papua, Orang Timur dan Jawa. Setiap *nodes* kemudian menurunkan *cases* yang memiliki irisan satu sama lain, yakni: Pemerintah, Merdeka, Ancaman, Budaya, Mereka, Yogyakarta, Nyaman, Komunitas, Indonesia, Mahasiswa. Dari peta *nodes* ada kelekatan argumentasi dari sumber yang terkumpul antara “Mahasiswa Papua dan Masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk lebih merapatkan *nodes*, *cases*, serta sumber, maka kedua *nodes* akan diurai secara berdampingan.

Figure 2 sunburst cases dari items coded

Mahasiswa Papua

Sebelum terlalu jauh menggambarkan diagram *cases*-nya, terlebih dahulu saya akan menjabarkan isi dari kata *Mahasiswa Papua* itu sendiri. Ketika mendefinisikan dua suku kata itu, maka berbunyi: Mahasiswa Papua adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat; S1 dan S2 yang melanjutkan studi di DI. Yogyakarta. Definisi awal ini perlu agar peletakkan suatu entitas tidak “dipukul rata” dalam melihat sesuatu. Definisi ini juga kemudian memberitahu kita bahwa para lulusan di atas berasal dari identitas dan pengalaman budaya berbeda-beda. Mereka inilah yang menghuni D.I Yogyakarta, yang konon ribuan, baik yang tinggal di asrama mahasiswa pemprop/pemda atau di asrama mahasiswa Papua yang lebih ditandai sebagai komunitas yang menghubungkan mahasiswa Papua dari segala penjuru identitas.

Pulau Papua sangat lebih luas dari Pulau Jawa. Papua memiliki 466⁸ suku (ditambah suku “pendatang” yang telah menjadi warga Papua) baik yang tinggal di pegunungan dan pesisir. Karena terletak di ujung timur Indonesia, mahasiswa Papua sering disamakan dengan kata “orang timur”, yang sekaligus berlaku bagi tetangga pulaunya, seperti Ambon, NTT, dan Sulawesi. Penggolongan ini juga kadang membingungkan, misalnya NTT di sebut “orang timur” sedangkan NTB disebut orang Lombok atau Bima saja. Parahnya lagi, identifikasi tentang NTT yang secara geografis berada di wilayah paling selatan Indonesia, dipahami secara keliru. Identifikasi lain yang kita temui adalah bahwa warna kulit “orang timur” (Papua) hitam dan rambutnya keriting. Argumentasi ini bagi saya mirip dengan kebohongan iklan pemutih di tv bahwa dengan membeli dan menggunakannya, kulit orang Indonesia bisa berubah menjadi putih. Saya tidak pernah melihat suku di Indonesia ini yang berkulit putih ataupun hitam. Yang pernah saya lihat langsung hanyalah tembok hitam dan putih, kulit coklat serta rambut keriting pada manusia mana saja di Indonesia ini.

Kegagalan identifikasi terhadap Papua atau “Orang Timur” melahirkan generalisasi, justifikasi, stereotipikasi dan stigmatisasi. Peristiwa Cebongan 2014 ditandai sebagai puncak stigmatisasi ini. “Ada sekitar 10 orang asal Maluku yang mengatakan hal yang sama. Bahwa sejak kasus Cebongan, orang-orang yang diidentifikasi berasal dari Indonesia timur mendapat diskriminasi parah di Yogya. Contoh yang paling terasa buat para mahasiswa ini adalah, mereka sangat sulit mendapatkan indekos maupun rumah kontrak. Menurut Fajrin, bahkan ada rumah di kawasan Gowok, dekat UIN Sunan Kalijaga, yang sampai memasang plang di depan rumah, isinya menolak menerima orang Indonesia timur. Cerita dari Bang Firman, sesepuh asrama Halteng, ia juga mengalami penolakan ketika mencari kos untuk

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_Papua

adiknya di sekitaran Gamping. Kata Ismul, kawan saya yang asal Sula, pernah terjadi ketika jelas-jelas di depan kos ada tulisan “kosong” tetapi pemiliknya mengatakan penuh karena tahu mereka dari Indonesia timur.”⁹

Data yang *dinodes*, kata *Mahasiswa Papua* mengarahkan pananya pada *cases* paling banyak. Dari kata tersebut menyembur banyak irisan. Berikut diagramnya:

Figure 3 diagram nodes Mahasiswa papua

Diagram *Mahasiswa Papua* melahirkan sepuluh *cases* dan sangat rapat dengan tiga kata berikut: Mahasiswa, Indonesia, dan Komunitas. Seperti yang saya gambarkan sebelumnya, kehadiran mahasiswa Papua di Yogyakarta tidaklah tunggal. Penanda paling sering muncul adalah mereka yang terhubung dengan kata komunitas. Kata komunitas inilah yang mendapatkan pelabelan dari apparatus pemerintah (polisi) sebagai yang mengancam – konsekuensi wacana ini meluber ke mana-mana, bahkan percikannya mengenai siapa saja yang disebut Papua atau “Orang Timur”.

Polantas Yogyakarta menjelaskan lewat beberapa kasus keributan yang dilakukan komunitas ini: Pertama, “Saat itu petugas menghentikan *orang papua* yang mabuk dan menerobos lampu merah, setelah ditindak petugas, puluhan *mahasiswa papua* yang merupakan teman dari tersangka datang ke pos polisi dan melakukan perusakan. Kedua, di jembatan janti pernah juga petugas menilang *mahasiswa papua*, malamnya kembali puluhan *komunitas papua* mendatangi Polsek Depok Barat dan melakukan perusakan. Ketiga, kejadian yang paling terakhir, minggu lalu ada seorang *mahasiswa papua* menabrak becak di Sp. 4 Tugu, kemudian pelaku memukuli tukang becaknya, kemudian petugas polantas dan PM (Polisi Militer) yang sedang berjaga bermaksud meleraikan, tapi malah mendapat serangan (meski ditangkis petugas) dari

⁹ dikutip dari etnohistori.com. terbit 10 Januari 2015, judul: bagaimana rasanya takut?

pelaku, dan ketika berhasil diamankan dan diserahkan ke petugas reserse, pelaku tidak lama kemudian dilepas kembali, bahkan petugas polantas yang pertama meleraikan dan mendapat serangan tersebut oleh kesatuan terkesan "disalahkan" atas kejadian tersebut".¹⁰

Tiga kasus di atas tampaknya menunjukkan ada kekuatan besar dibaliknya, untuk tidak mengatakan kalau ada permainan di balik semuanya. Hukum Indonesia tampak tak berdaya. Begitu lemah menghadapi kasus yang diakibatkan oleh komunitas saja. Apakah ia sekadar komunitas? Ataukah ia seperti kerajaan bisnis? Entah. Yang jelas ada alasan paling mengejutkan dari Pihak Satlantas Yogyakarta, yaitu: Perlu diketahui, *kebanyakan mahasiswa papua* yang berada di wilayah DIY, khususnya yang tinggal di asrama adalah simpatisan OPM, bisa anda buktikan jika mereka melakukan demo pasti semua membawa pernik/aksesoris berciri bendera bintang kejora, yang merupakan bendera OPM. Hal inilah yang bahkan oleh Gubernur DIY ditekankan kepada jajaran Polda DIY untuk bijak ketika menghadapi *komunitas papua* yang berada di wilayah DIY. Kejadian penyerbuan di kampung Pingit serta di Babarsari beberapa waktu lalu juga menjadi *atensi* Gubernur DIY yang notabene merupakan Raja dari Kraton Yogyakarta Hadiningrat."¹¹ Saya terdiam sejenak. Ada apa?

Alasan di atas menandai adanya rasa takut dan terancam yang dialami oleh pemerintah. Rasa takut ini cukup ironis karena bagaimanapun juga polisi adalah alat negara yang paling kuat serta memiliki legitimasi represif ketika ada ancaman terhadap Negara. Tanpa bermaksud melanjutkan kalimat, Made Supriatma: "Today I got this report, "Dari 30 April 2013 s.d. 15 Juni 2016, sebanyak 5.033 orang Papua ditangkap TNI/Polri." Amazing, isn't it?"¹² Begitu rapuhnya alasan polisi dalam penegakan hukum, begitu dibiarkannya kecurigaan berlarut-larut terhadap asrama mahasiswa sebagai basis simpatisan OPM. Alasan ini membuat kita sulit untuk tidak mencari adanya indikasi lain.

Mari coba kita cermati ramainya respon slogan: Jogja berhenti Nyaman. Sejak tahun 2013 sekelompok seniman Jogja membangun sebuah gerakan protes lewat wacana "Jogja Ora Didol". Ungkapan ini merespon menggilanya penggusuran yang disebabkan oleh pembangunan gedung tinggi di kota rawan gempa. Menurut Prima Sulistya Wardhani "Jika asrama daerah dituding menyebabkan primordialisme, maka

¹⁰ Cahyogya.com. respon SATLANTAS Yogyakarta setelah seorang mention di twitter akun Satlantas Yogyakarta (@korlantas) Mempertanyakan Alasan Polisi Istimewakan Orang Timur di Jogja. Dan mereka mengirim email respon yang dibuka dengan kalimat berikut. Selamat pagi, melanjutkan pertanyaan rekan di twitter, berikut sedikit kami jelaskan mengapa terkesan ada "perbedaan" penegakkan hukum kepada mahasiswa papua yang berada di wilayah DIY.

¹¹ Ibid,

¹² <https://www.facebook.com/m.supriatma>

apartemen-apartemen untuk mahasiswa (dengan harga Rp500 juta ke atas) yang sedang jadi tren di Yogya jelas akan menimbulkan kesenjangan sosial.”¹³

Masyarakat Jogja

Item cases “Masyarakat Jogja” adalah Budaya, Nyaman, dan Mereka. Sejak dulu *Jogja Kota Budaya*, *Jogja Kota Pendidikan*, dan *Jogja berhati Nyaman* merupakan slogan kota paling nikmat di telinga bangsa Indonesia. Ini pula alasan kuat para calon sarjana dari Papua untuk menjadikan Yogyakarta sebagai pilihan menimbah pengetahuan. Akan tetapi slogan itu kini dirasakan luruh.

Figure 4 Diagram Nodes Masyarakat Jogja

Pada tanggal 4 Oktober 2018, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPMA) Papua mendatangi kantor Gubernur D.I Yogyakarta. Mereka datang menyampaikan keresahannya akibat situasi kurang nyamannya warga Papua yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta. Dalam aksinya IPMA Papua menuntut: 1. Usut dan tuntaskan semua kasus kekerasan yang menimpa pelajar dan Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Berikan kenyamanan bagi kami pelajar dan mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kepolisian harus bersikap adil dalam mengusut semua kasus yang menimpa pelajar dan mahasiswa Papua 4. Berantas premanisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Berikan jaminan dan ruang kebebasan kepada mahasiswa Papua.

Tentu saja rasa tidak nyaman, untuk tidak menyebutnya rasa terancam, memiliki irisan dengan penelitian Sawilda yang melihatnya dari kacamata orang Jogja mengalami

¹³ etnohistori Sabtu, 10 Januari 2015.

rasa terancam. Sampai di sini saya tidak mau mengatakan bahwa penelitian tersebut kontradiktif dengan rasa ketidaknyaman yang dihadirkan di atas. Saya baru menduga, kemungkinan ada benang kusut yang harus diurai perlahan. Sebab dari data yang muncul pada *Masyarakat Jogja* atau kata *Budaya* hanya selalu mampu direpresentasikan oleh kekuasaan (Gubernur, Raja, dan Polisi). Hal ini dipertegas kembali dengan munculnya kata *Mereka* sebagai sesuatu yang lain. "...khususnya yang tinggal di asrama adalah simpatisan OPM,...bahkan oleh Gubernur DIY ditekankan kepada jajaran Polda DIY untuk bijak ketika menghadapi komunitas papua yang berada di wilayah DIY...atensi Gubernur DIY yang notabene merupakan Raja dari Kraton Yogyakarta Hadiningrat.¹⁴

Jogja dan Papua sebagai penanda kosong (kemustahilan)

Subjek otentik Lacan adalah subjek yang terbelah, kosong, dan selalu mengalami *lackness*. Sebagaimana dalam uraian awal saya di atas, bahwa pelarian subjek ke tatanan simbolik (bahasa) adalah karena sang anak melihat ibunya atau "yang lain" retak, kosong atau *lackness*. Rupanya yang dihasrati sang ibu bukanlah saya, melainkan Sang Ayah. Seperti diketahui, sang ayah juga adalah kata ganti dari "Yang Lain" yang dianggap mampu memberi kenikmatan pada subjek yang selama ini retak. Jalan satu-satunya untuk menemukan kembali harapan atas kehilangan atau kekurangan sebelumnya itulah mau tidak mau membuat subjek memasuki tatanan simbolik.

Kehadiran mahasiswa Papua di Yogyakarta bukan tanpa sebuah irisan sejarah penting. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno memimpin rapat raksasa Trikora di Alun-alun Utara Jogja, dan megumandangkan untuk mengembalikan Papua Barat ke pangkuan Indonesia. Setelah rapat berlangsung, Sri Sultan HB IX mengumumkan untuk memberi beasiswa kepada 6 hingga 9 pemuda Papua untuk belajar di Yogyakarta; memberikan kesempatan kuliah di Universitas Widya Mataram dan memfasilitasnya tempat tinggal berupa asrama Kamasan.¹⁵ Asrama ini sampai sekarang masih digunakan mahasiswa asal Papua, bahkan sering dijadikan sebagai pusat pertemuan untuk semua komponen mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Dalam konteks psikoanalisa Lacan, peristiwa Trikora dan pengembalian tanah Papua Barat dalam kedaulatan NKRI bisa dilihat dalam akhir odipus-kompleks. Fase ini menseparasi anak dari tatanan imajiner menuju dunia simbolik. Jika dilihat dalam pembentukan subjeknya, sejak anak tahu kalau sang ayahlah (ayah imajiner) yang dihasrati ibu, maka ia berhenti menjadi objek falus (untuk mengganti *lackness* ibunya),

¹⁴ Cahyogya.com. respon SATLANTAS Yogyakarta

¹⁵ Moh Rafli Abbas. KONSTRUKSI IDENTITAS KE-PAPUA-AN DI KOTA MULTI KULTURAL (REFLEKSI KOTA YOGYAKARTA DALAM KAJIAN IDENTITAS. Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016. Hlm. 104-105.

karena takut kastrasi.¹⁶ Di sinilah mahasiswa Papua mulai bergeser melihat ayah simbolik (Indonesia, Yogyakarta, Soekarno, Sri Sultan HB IX) yang menawarkan pemenuhan padanya. Papua di bawah Hindia Belanda dipandang sebagai ibu yang retak, mustahil memberikan kenikmatan.

Mahasiswa asal Papua dari tahun ke tahun makin meminati Yogyakarta sebagai pilihan studi. Ini berarti tatanan simbolik di atas memenuhi harapan pemenuhan, dalam arti menjanjikan untuk memenuhi rasa kehilangan – Papua sebagai Yang Real. Minat ini juga didorong beberapa faktor, termasuk banyaknya beasiswa yang dikhususkan kepada orang Papua. Setiap tahun ratusan putra-putri Papua mendapat beasiswa melalui Program ADEM untuk belajar di tingkatan Sekolah Menengah Atas di luar Papua. Tak hanya itu, ada juga program lanjutan beasiswa untuk lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas dapat mengikuti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Program ini meningkat dari tahun ke tahun. Kuota beasiswa ADIK di tahun 2014 baru sebesar 269 orang, namun pada tahun 2015 sudah naik menjadi 434 orang.¹⁷ Untuk pemenuhan kualitas pendidikan dapat dilihat sejak HB IX hingga sekarang orang Papua mendapat porsi tambahan. Lantas mengapa di saat pemenuhan kenikmatan oleh Sang Ayah di tatanan simbolik, kalangan mahasiswa Papua masih menunjukkan sikap tidak puas?

Masih belum lama ini kita menyaksikan penyampaian sikap IPMA Papua dengan mendatangi kantor Gubernur D.I.Y. Mereka dengan tegas menyampaikan ketidaknyamanan mahasiswa Papua di Jogja. Dalam pernyataan sikapnya, IPMA Papua MENUNTUT: 1. Usut dan tuntaskan semua kasus kekerasan yang menimpa pelajar dan Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Berikan kenyamanan bagi kami pelajar dan mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kepolisian harus bersikap adil dalam mengusut semua kasus yang menimpa pelajar dan mahasiswa Papua 4. Berantas premanisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Berikan jaminan dan ruang kebebasan kepada mahasiswa Papua.

Tatanan simbolik (Yogyakarta) merupakan tatanan yang melahirkan subjektivitas Aku. Aku di sini telah berubah dari aku (ego) menjadi Aku yang untuk memenuhi kebutuhanku dengan jalan bahasa. Makanya subjek ini biasa disebut *subject of demand* – dengan berbahasa hendak memiliki apa yang diminta dan dibutuhkannya. Konsekuensi berbahasa adalah membuat subjek mampu menyatakan apa yang diinginkannya. Ketika sebuah pemenuhan tidak dapat diraih, di sinilah subjek mengidentifikasi bahwa Sang Ayah (tatanan simbolik) juga *lackness* – mustahil

¹⁶ Irfan Palippui, PENGALAMAN SUBJEKTIVITAS RELIGIUS LEWAT HAJI BAWA KARAENG. Tesis. Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013. Hlm. 17

¹⁷ <http://presidenri.go.id/berita-aktual/beasiswa-untuk-papua.html>

menutupi segala bentuk kehilangan sebelumnya. Artinya subjek mau tidak mau mencari objek kenikmatan lainnya.

Beberapa tahun lalu, status keistimewaan Yogyakarta dipertegas ulang melalui UU No. 13 tahun 2012. Undang ini berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan, yakni: mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Sebagaimana telah saya kemukakan dimuka, Yogyakarta bukan tanpa memiliki masalah dan kemustahilannya sendiri. Sang Ayah juga *lackness*, mustahil mengatasi segala pemenuhan di tatanan simbolik. Dalam soal pengisian jabatan kepala daerah, misalnya, UU ini melahirkan perdebatan serta polemik panjang. Masyarakat Jogja terbagi dua, antara yang pro-pemilihan langsung dan penetapan lewat DPRD. Kita juga mafhum kalau di internal kesultanan sendiri ada desas desus konflik mengenai peralihan kekuasaan setelah sang raja saat ini. Di tambah lagi ramainya protes-protes lain dari masyarakat Jogja, seperti tata ruang kota yang makin sesak serta maraknya penggusuran.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Satlantas Yogyakarta mengenai penanganan mahasiswa asal Papua sangat naif dan terkesan tautologis. Hal ini dikuatkan oleh Zizek vi Robet, “ Perintang adalah hal positif bagi (identitas) yang melihat dirinya (masyarakat) sebagai yang utuh. Penyematan kepada orang Yahudi, misalnya, sebagai agen asing yang menciptakan disintegrasi dan antagonisme merupakan kerja fantasi yang sesungguhnya menolak kata harmonis itu sendiri.”¹⁸ Ide masyarakat utuh dan harmonis adalah suatu yang tak mungkin. Sehingga untuk menutupi kemustahilan dari subjek atau masyarakat utuh (Jogja Nyaman) adalah dengan terus mempertahankan mahasiswa Papua sebagai produsen stereotype sekaligus dipakai sebagai “kambing hitam.”¹⁹

¹⁸ Robertus Robet, Manusia Politik, subyek radikal dan politik emansipasi di era kapitalisme global, menurut Slavoj Zizek, Marjin kiri, 2010. Hlm. 154

¹⁹ ibid, 153